

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengangguran merupakan masalah yang sulit dihindari oleh setiap negara. Pada kenyataannya semua negara didunia pasti mengalami masalah pengangguran dan tentunya dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda di setiap negara. Pengangguran sering menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran maka produktivitas dan pendapatan masyarakat akan menurun sehingga dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Pengangguran ialah persoalan sangat buruk dampaknya pada perekonomian serta masyarakat. Pengangguran yang tinggi memiliki efek buruk baik pada perekonomian, seseorang maupun rakyat, Sukirno dalam kutipan (Urmila dkk., 2022). Tingkat pengangguran juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Alasannya jelas karena tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, demikian juga sebaliknya.

Tingkat pengangguran terbuka adalah salah satu indikator penting dalam ekonomi suatu negara. Indikator ini sangat penting bagi negara-negara berkembang di dunia, khususnya Negara Indonesia yang memiliki penduduk terbesar keempat didunia sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan yang bersifat strategis, Sjafrizal dalam kutipan (Tumilaar dkk., 2022). Menurut Sukirno (2016) pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang siap untuk bekerja namun tidak memiliki pekerjaan, atau sedang mencari

pekerjaan, yang sedang mendirikan sebuah usaha, atau orang yang belum mulai bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.

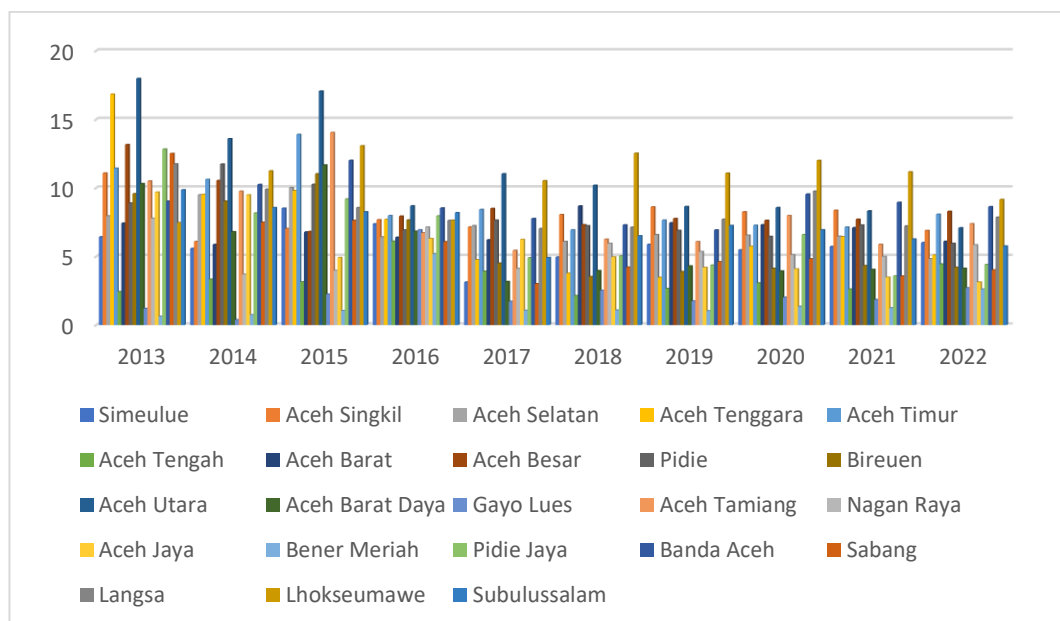
Permasalahan yang umumnya terjadi di beberapa negara berkembang terutama Indonesia yaitu banyaknya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran dilatarbelakangi ekstremnya peningkatan jumlah Angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja dan memiliki persentase kecil. Hal tersebut dikarenakan rendahnya perkembangan penyediaan bidang kegiatan dan usaha dalam menampung pekerja dengan kondisi siap bekerja (Barusman & Setiawan, 2014). Di Indonesia masih banyak terdapat penduduk yang tidak produktif disebabkan adanya faktor hambatan dalam ketersediaan lowongan kerja.

Selain permasalahan kekurangan lapangan pekerjaan yang memadai, Indonesia juga memiliki permasalahan lain yaitu kurangnya skill setiap individu. Meskipun lapangan pekerjaan mencukupi namun tidak diiringi dengan skill maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran (Hasanah dkk., 2021). Dewasa ini terlihat jumlah angkatan kerja di Indonesia semakin bertambah. Banyaknya jumlah pelamar kerja yang tidak sejajar bersama daya tampung dari lapangan pekerjaan memicu permasalahan yang merupakan inti dari pengangguran (Sembiring & Sasongko, 2019).

Salah satu Provinsi di Indonesia yang berada ujung Sumatera yaitu Provinsi Aceh, mengalami permasalahan yang cukup kompleks dalam hal mengatasi pengangguran yang ada di Provinsi ini. Bahkan Provinsi ini dinobatkan sebagai

salah satu Provinsi termiskin dan mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi di bagian pulau Sumatera. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi masalah serius karena dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memahami pengaruh faktor-faktor seperti upah minimum, Tingkat Partisipasi angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dalam runtun tahun 2013 sampai tahun 2022 menunjukkan keadaan tingkat pengangguran terbuka di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang mengalami fluktuasi. Data perkembangan tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



Sumber : BPS Aceh, 2024

**Gambar 1.1**  
**Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022**

Dari gambar tersebut diketahui bahwa TPT di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh mengalami keadaan fluktuatif. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi masalah serius karena dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Untuk mengatasi masalah ini,

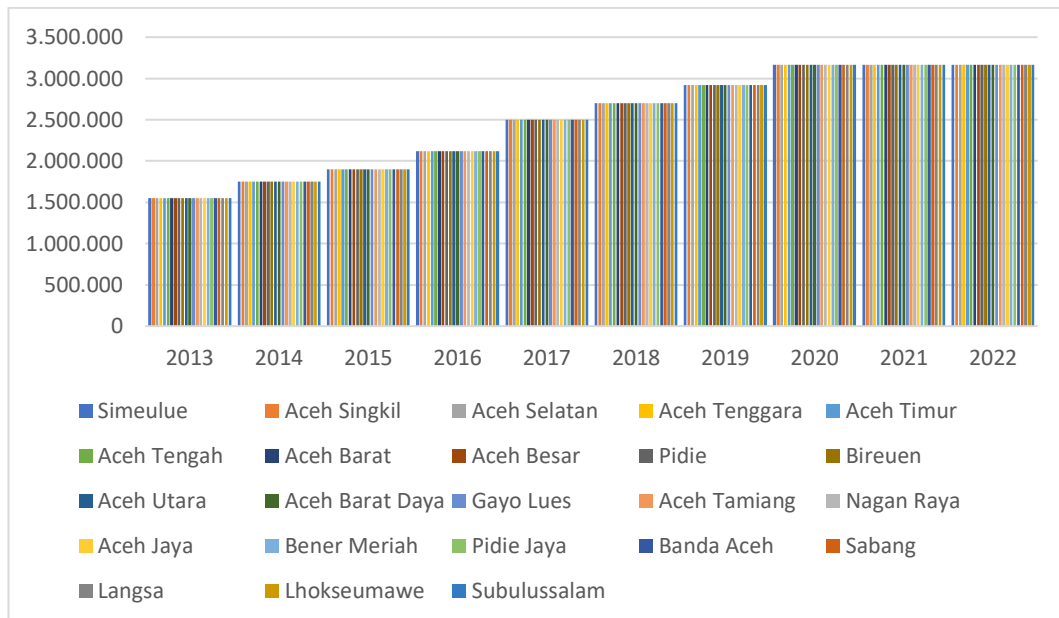
penting untuk memahami pengaruh faktor-faktor seperti upah minimum provinsi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Faktor pertama yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah upah minimum provinsi (Prawira, 2018). Upah Minimum Provinsi adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya, Susanti dalam (Fahira & Andriyani, 2022). Adapun hubungan antara upah minimum dengan tingkat pengangguran adalah semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut, Kaufman dan Hotchkiss dikutip dalam (Prawira, 2018).

Permasalahan dasar yang berkaitan dengan upah sama di setiap negara, akan tetapi cara penanggulangannya dan peraturannya berbeda antar negara. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya, Sinaga dalam kutipan (Armidi dkk., 2018).

Dampak positif dari penetapan upah dilihat dari penawaran tenaga kerja dimana kenaikan tingkat upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat, sehingga jumlah pengangguran akan berkurang. Sedangkan dampak

negatifnya yaitu dilihat dari sisi permintaan, semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada wilayah tersebut (Sahara & Iryani, 2023). Data upah minimum provinsi di Provinsi Aceh sebagaimana yang telah di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:



Sumber : BPS Aceh, 2024

**Gambar 1.2**  
**Grafik Upah Minimum Provinsi di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022**

Berdasarkan data upah minimum provinsi di Provinsi Aceh diatas, diketahui bahwa upah minimum provinsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota seperti Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe dan Subulussalam adalah tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan sedangkan upah minimum provinsi mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan teori Kaufman dan Hotchkiss dalam (Prawira, 2018).

Fenomena ini sesuai dengan hasil penelitian Sisnita & Prawoto (2017) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Hal tersebut menunjukkan jika upah minimum naik akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Sedangkan hasil penelitian Prawira (2018) menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan jika upah minimum provinsi naik, maka tingkat pengangguran di Indonesia juga akan naik.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap pengangguran adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (Salsabila dkk., 2022). Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam kegiatan perekonomian sebagai sarana dalam satu kegiatan seperti produksi, tenaga kerja dianggap lebih penting dari pada sarana produksi dimana tenaga kerja sangat menentukan maju mundurnya suatu wilayah. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dari tahun ketahun diharapkan dapat berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Maulina & Andriyani, 2020).

Gagasan tersebut juga didukung oleh Mirah dkk., (2020) yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah modal untuk memutar roda pembangunan. Seiring dengan berjalannya proses demografi, jumlah dan komposisi angkatan kerja akan terus berubah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus terus ditunjang dengan ketersediaan tenaga kerja baik terampil maupun tidak terampil, dan pengembangan lapangan kerja juga didukung oleh upaya peningkatan kualitas.

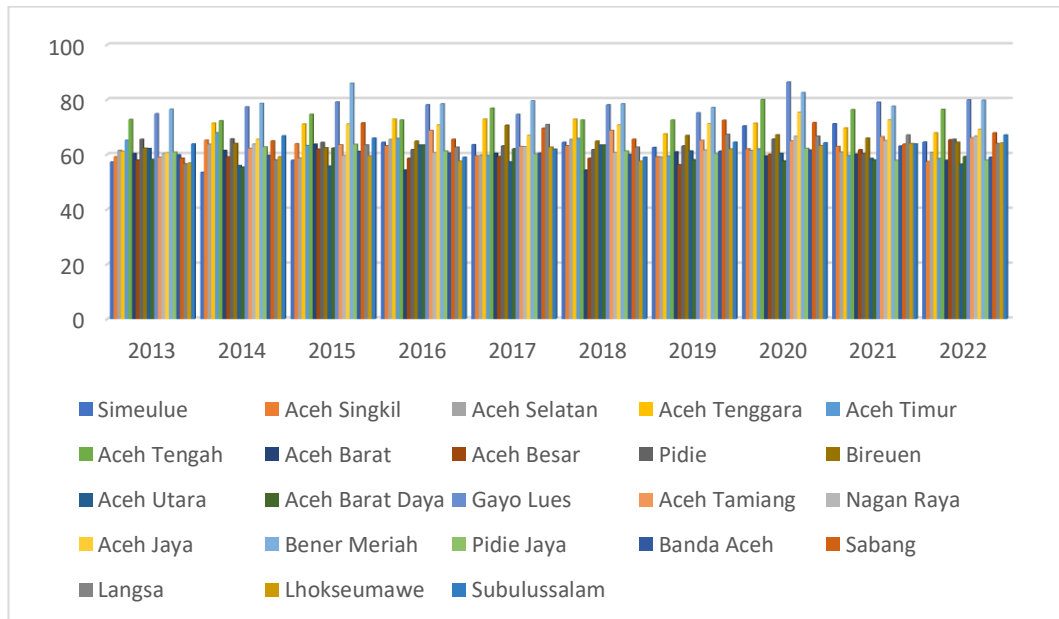
Dikutip dari Badan Pusat Statistik (2023) TPAK merupakan ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dipasar tenaga kerja, baik itu dengan bekerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang memberikan

ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam proses produksi barang dan jasa. Maulina & Andriyani (2020) menyatakan bahwa, peningkatan TPAK menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bekerja yang juga dapat menunjukkan peningkatan dalam kualitas sumberdaya manusia. Selain itu peningkatan TPAK juga menunjukkan keberhasilan ekonomi.

TPAK merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Rasio penduduk yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan terhadap semua penduduk usia kerja dikenal dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja yang benar-benar dipekerjakan atau telah diserap oleh permintaan akan tenaga kerja, apakah mereka menganggur atau setengah menganggur merupakan kelompok kerja. Bank Dunia mendefinisikan siapa pun yang berusia antara 15 hingga 64 tahun sebagai usia produktif juga dikenal sebagai penduduk usia kerja. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin banyak pekerja yang siap bekerja di pasar tenaga kerja (Ikhsan, 2016).

Menurut Mulyadi (2014), semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik. Bila peningkatan tersebut seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, namun jika yang terjadi justru sebaliknya tentu hal ini tidak baik. Dengan kata lain akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan dalam menampung angkatan kerja. Kenaikan angkatan kerja menunjukkan bahwa ada lebih banyak tenaga kerja yang tersedia di pasar. Namun, peningkatan pasokan tenaga kerja ini tidak selalu diimbangi dengan peningkatan permintaan tenaga kerja, yang menyebabkan pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2023).

Data tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Aceh sebagaimana yang telah di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini:



Sumber : BPS Aceh, 2024

**Gambar 1.3**  
**Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh**  
**Tahun 2013-2022**

Berdasarkan data tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Aceh diatas, diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka. Namun fenomena yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota seperti Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Besar dan Aceh Barat pada tahun 2021 serta Aceh Tengah, Gayo Lues, Nagan Raya, Bener Meriah, Pidie Jaya dan Sabang pada tahun 2022 adalah tingkat partisipasi angkatan kerja bertambah dan tingkat pengangguran terbuka meningkat. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan teori Mulyadi (2014).

Fenomena ini sesuai dengan hasil penelitian Rambe & Prihanto (2019) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif namun



tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Artinya perubahan yang terjadi pada tingkat partisipasi angkatan kerja tidak selalu mengakibatkan berubahnya tingkat pengangguran terbuka, karena tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi belum tentu menjamin pengangguran terbuka berkurang. Sedangkan hasil penelitian Salsabila dkk., (2022) menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Artinya setiap penambahan 1% tingkat partisipasi angkatan kerja maka dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

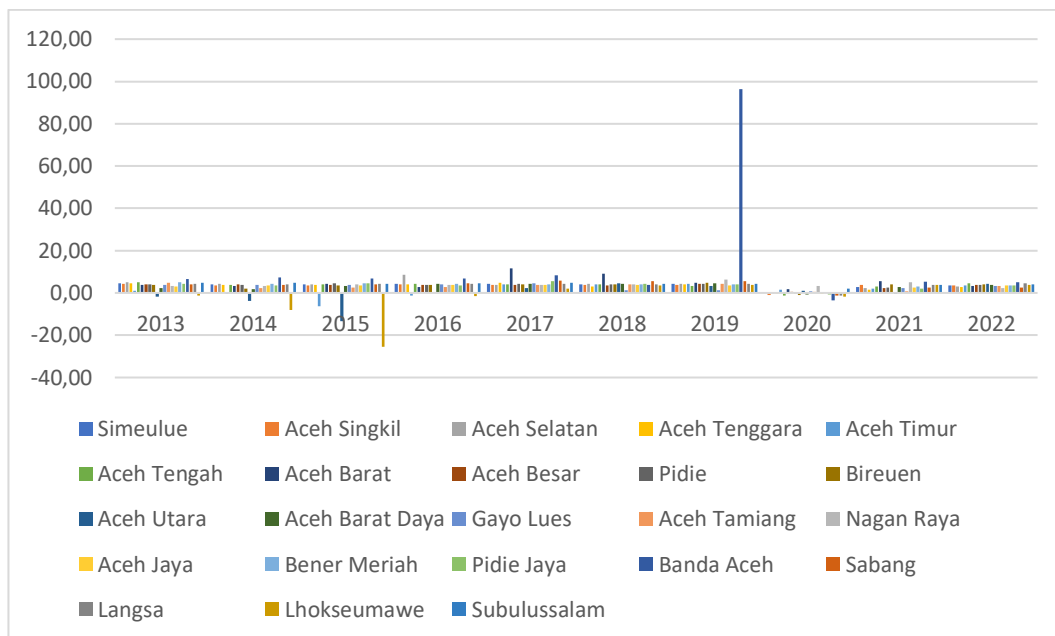
Faktor terakhir yang juga dapat mempengaruhi Tingkat pengangguran terbuka adalah pertumbuhan ekonomi (Kasanah dkk., 2018). Bagi suatu negara pembangunan ekonomi sangat penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang dicapai. Suatu negara dapat dikatakan mencapai keberhasilan pada pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat pertumbuhannya (Padang & Murtala, 2020). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2016). Dewi dkk., (2022) menyatakan pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin baik suatu negara mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan semakin besar kemampuannya untuk membantu orang-orang di berbagai negara berkembang.

Sukirno (2016) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang akan di produksi dalam masyarakat bertambah. Dimana masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam

jangka panjang. Dewi dkk., (2022) menyatakan pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi orang-orang selama periode waktu tertentu. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara terus menerus tiap tahunnya akan memajukan pembangunan di suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita di masyarakat yang nantinya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Adapun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat dalam suatu negara berdampak pada derasnya modal yang masuk ke negara tersebut sehingga memberikan kesempatan kerja yang ditandai banyaknya sektor usaha baru yang sistemnya berorientasi pada padat karya, sehingga mengurangi jumlah pengangguran di negara tersebut (Kurniawan, 2013). Pertumbuhan ekonomi juga dapat menyebabkan berkembangnya suatu aktivitas ekonomi yang menjadikan barang serta jasa yang diproduksi meningkat sehingga penduduk menjadi lebih makmur (Rahmanita & Usman, 2023).

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Kasanah dkk., (2018) bahwa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya jumlah pengangguran akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan perubahan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh yang diukur dari PDRB sebagaimana yang telah di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut ini:



Sumber : BPS Aceh, 2024

**Gambar 1.4**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh**  
**Tahun 2013-2022**

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh diatas, diketahui bahwa pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh seperti Simeulue, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya dan Langsa mengalami peningkatan. Namun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 di Kabupaten/Kota tersebut juga mengalami peningkatan. Fenomena tersebut bertentangan dengan gagasan Kurniawan (2013) dan hasil penelitian Rahmanita & Usman (2023) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Artinya pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi pengangguran terbuka dapat disebabkan karena pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga meningkatnya lapangan kerja.

Penting untuk memahami bahwa interaksi antara faktor-faktor ini sangat kompleks. Upah minimum yang seimbang, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan

tingkat partisipasi angkatan kerja yang terampil dan berkualifikasi adalah faktor-faktor penting dalam mengendalikan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dan koordinasi di antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sangat diperlukan untuk mencapai tingkat pengangguran yang rendah dan berkelanjutan dalam suatu negara. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa Besarkah Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh?
2. Seberapa Besarkah Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh?
3. Seberapa Besarkah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh?
4. Seberapa Besarkah Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
4. Mengetahui Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait agar dapat memperhatikan masalah pengetahuan tentang pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian, terutama penelitian tentang Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Instansi**

Diharapkan adanya penelitian ini memberi masukan kepada pemerintah setempat dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Memperoleh pengetahuan, wawasan, informasi jelas dan sebagai pengalaman untuk menerapkan upaya-upaya baru demi meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia.

#### **3. Bagi Peneliti**

Penelitian ini adalah salah satu kesempatan bagi si peneliti guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman.